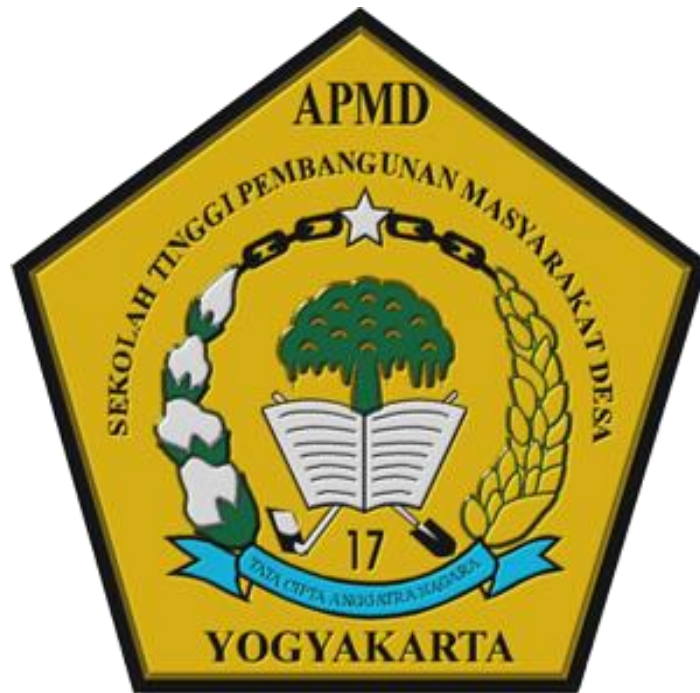


**KINERJA KEPALA DUSUN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS
KEWILAYAHAN DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN
KLATEN
SKRIPSI**



Disusun Oleh:

ANGGIT DWI FEBRI HANDOKO

19520034

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

**KINERJA KEPALA DUSUN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS
KEWILAYAHAN DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN
KLATEN
SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023

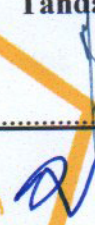

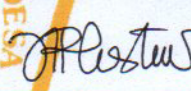


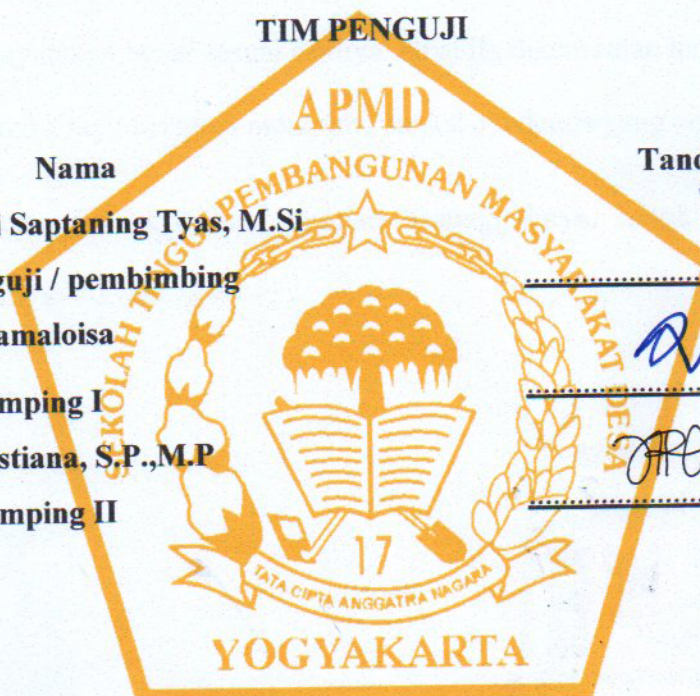
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Juni 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

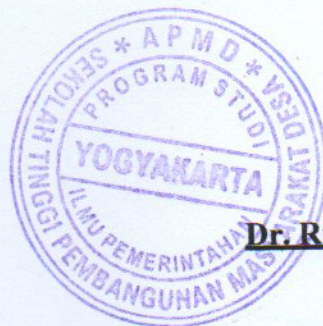
TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra.B Hari Saptaning Tyas, M.Si Ketua penguji / pembimbing	
2. Dr. Rijel Samaloisa Penguji Samping I	
3. Utami Sulistiana, S.P.,M.P Penguji Samping II	



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggit Dwi Febri Handoko
Nim : 19520034
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Juni 2023

Yang Menyatakan



(Anggit Dwi Febri Handoko)

19520034

MOTTO

“Sesuatu yang kita hadapi tidak selalu bisa di ubah. Namun, kita tidak bisa mengubah sesuatu sampai kita menghadapinya”.

(Merry Riana)

“Jika kamu ingin bahagia, tetapkan sasaran yang membangkitkan pikiran, membebaskan energi dan menginspirasi harapanmu”

(Andrew Carnegie)

“Berhentilah menjadi seseorang yang selalu ada untuk orang yang menjadikanmu sesempatnya 😊”

(Difarina Indra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, waktu, dan segala kemudahan,. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berharga dan penulis sayangi:

1. Kepada kedua orangtua penulis Bapak Mujiyo dan Ibu Harmiyatun, yang selalu mencurahkan seluruh kasih sayang, dukungan serta doa restunya dalam membimbing penulis di setiap langkah dalam kehidupan sejak penulis dilahirkan sampai saat ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk bapak dan ibu saya terima kasih atas usaha dan jerih payah dalam membiayai pendidikan kuliah saya dan memberikan fasilitas dalam mendukung dalam pendidikan kuliah. Tentunya hal tersebut menjadikan semangat saya dalam berjuang Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Kepada dosen pembimbing saya Ibu Dra.B.Hari Saptaning Tyas, M.Si. terima kasih ibu yang telah sabar dalam membimbing penulis, terima kasih atas dukungan dan motivasinya yang telah ibu berikan kepada saya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya hanya tuhan yang bisa membalas kebaikan Ibu.
3. Untuk Muhammad Raffly terima kasih telah memberikan wejangan dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar, terima kasih telah mendukung setiap proses proses saya baik dalam perkuliahan maupun persahabatan .
4. Kepada Kepala Desa Leses beserta jajaran Perangkat Desa Leses serta Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Desa Leses, terima kasih telah memberikan waktu dan di tempat untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman teman seperjuangan penulis yang sama sama berjuang menyelesaikan Skripsi: Muhammad Rafly, Yuli Wibowo, Adhitya Pradana, Galuh Kusuma Ningtantri, David Rahmad, Rofiq Aditya, Julita Tarabit, Donartus, Susan, Anhar, Cesar Wahyu, Ardian Sunarma, Oky Febrian, Winda Yulianti, Anisa Septiana,

Setianingsih, Yarda, Rey, Lusi, Intan, Sophia, Agus Priyono, Muhammad Andaru, Ilham Wahyu, Danar, Juan, Fakih, Reza, Faruq. Terima kasih Kehadiran kalian tentunya memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga kita bisa sukses dikemudian hari.

6. Untuk kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta, terima kasih telah menjadi tempat saya belajar, mencari ilmu dan pengalaman dalam menggapai cita – cita.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaannirohim

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Segala Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah Nya berupa kesehatan, kesempatan, keberkahan, waktu, dan segala kemudahan, Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: KINERJA KEPALA DUSUN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEWILAYAHAN DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN, sebagai prasyarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik. Terelesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya, Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samalosa Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra.B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rijel Salamoisa selaku penguji I yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P Selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Dra.B Hari Saptaning Tyas, M.Si dosen wali saya yang telah membimbing penulis dari semester awal, proses akademis hingga penulisan skripsi.

8. Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah membekali banyak pengetahuan dan memberikan banyak pengalaman.
9. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Leses yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Orang tua penulis Bapak Mujiyo dan Ibu Harmiyatun yang selalu mencurahkan seluruh kasih sayang, dukungan serta doa restunya.
11. Untuk semua sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 juni 2023

Penulis

Anggit Dwi Febri Handoko

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
INTISARI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Literatur Riview.....	8
G. Kerangka Konsep	17
1) Pengertian Kinerja	17
2) Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	24

3) Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Desa	24
4) Pelaksanaan Kewilayahan	31
H. Metode Penelitian	33
1) Jenis Penelitian	33
2) Metode/Teknik Pengumpulan Data	33
a. Observasi	33
b. Wawancara	34
c. Dokumentasi	34
3) Unit Analisis	35
a. Lokasi Penelitian	35
b. Objek Penelitian	35
c. Subjek Penelitian	35
4) Teknik Analisis Data	36
a. Pengumpulan Data	36
b. Reduksi Data	37
c. Penyajian Data	37
d. Penarikan Kesimpulan	38
BAB II	39
PROFIL DESA LESES	39
A. Sejarah Desa Leses	39
B. Kondisi Geografis	40
a) Letak	40
b) Luas	41
c) Wilayah	41
C. Kondisi Demografis	43
D. Keadaan Ekonomi	45
E. Pemerintahan	48
1) Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa	48
2) Badan Permusyawaratan Desa	53
3) Visi dan Misi Desa Leses	54
F. Luas Kewilayahan Jumlah Penduduk Di Padukuhan Dan Sarana Prasarana	55
1) Luas Kewilayahan, Jumlah Penduduk Di Padukuhan	55

2) Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa Leses	56
1. Sarana dan Prasarana Keagamaan	56
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan	56
3. Sarana Prasarana Kesehatan Desa Leses	57
4. Sarana Ekonomi.....	57
 BAB III	 61
 KINERJA KEPALA DUSUN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEWILAYAHAN DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN	 61
1. Produktivitas Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan	61
2. Kualitas Pelayanan Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan	69
3. Responsivitas Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan	74
4. Responsibilitas Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan	80
5. Akuntabilitas Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan.....	83
 BAB IV.....	 89
 PENUTUP	 89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA.....	 93
 LAMPIRAN	 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan.....	36
Tabel 2.1 Daftar Penduduk Berdasarkan Umur	43
Tabel 2.2 Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	44
Tabel 2.3 Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	44
Tabel 2.4 Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	46
Tabel 2.5 Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 2.6 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Leses.....	49
Tabel 2.7 Struktur Badan Permusyawaratan Desa	54
Tabel 2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa Leses	42
----------------------------------	----

INTISARI

Kepala Dusun merupakan unsur membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah Dusun. Kepala Dusun memiliki fungsi: pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah sebesar 151.8480 Ha dan jumlah 2.699 jiwa yang terdiri dari 2 Kadus atau dengan nama lain Kabayan yang membawahi 16 Padusunan, yang mana masing masing Kadus memimpin 8 Padusunan. Kepala dusun di Desa Leses sangat sedikit jumlahnya dan tidak sesuai dengan besarnya jumlah dusun. Jumlah pelaksana kewilayahan di desa leses yang sedikit tentunya dipengaruhi oleh pendapatan asli desa yang rendah dalam penganggaran penghasilan perangkat desa. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap kinerja Kepala Dusun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2 kepala dusun yang membawahi setiap 8 padusunan kebanyakan kepala dusun lebih memprioritaskan padukuhan yang ditinggalinya, seperti pada kegiatan- kegiatan yang ada di masing masing padukuhan. Hal ini tentunya menyebabkan kecemburuan antar padukuhan yang lainnya. Sehingga hal tersebut menyebabkan kinerja kepala dusun dalam bidang lainya terhambat, tidak hanya itu dalam bidang mengayomi masyarakat tentunya juga kurang efektif karena kepala dusun tidak hanya membawahi satu padukuhan saja.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yakni deskriptif kualitatif. Unit analisis penelitian ini yaitu lokasi penelitian di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Obyek penelitian ini yaitu Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi seperti dokumen RPJMDes. Teknik analisis datanya menggunakan Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa **Pertama Produktivitas kepala dusun** di desa leses terdapat kelemahan yaitu kepala dusun leses ini hanya berjumlah dua orang, sehingga jika ada informasi-informasi untuk masyarakat selalu telat karena kepala dusun harus menghubungi RT/RW terlebih dahulu dan RT/RW. **Kedua kualitas pelayanan kepala dusun** leses dalam mengawasi pembangunan sudah berjalan sesuai dengan tupoksi, hal ini dibuktikan ketika saat gotong royong kepala dusun selalu mengajak anak-anak muda yang ada di dusun untuk turut membantu dan kepala dusun biasanya jika ada kegiatan gotong royong selalu memberikan rokok untuk penyemangat masyarakat. **Ketiga Responsivitas kepala dusun** di wilayah Desa Leses sudah dapat merespon masyarakatnya. dibuktikan dengan adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara pada saat musyawarah dusun disitu masyarakat diminta untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya seperti masyarakat meminta adanya sosialisasi tentang bahaya narkoba kemudian meminta diadakannya pengajian rutin dengan adanya ini dari masyarakat diharapkan akan lebih paham tentang agama dan akan menjauhi larangannya. **Keempat Responsibilitas kepala dusun** tanggung jawab kepala dusun dalam proses pembangunan jalan sudah hampir semua padusunan sudah diperbaiki, dan dalam menjaga lingkungan kepala dusun sudah meminta masyarakatnya selalu mengadakan kerja bakti bersih-bersih lingkungan, dan disini masyarakat selalu mendukung kinerja kepala dusun. **Kelima Akuntabilitas kepala dusun** Dalam pertanggungjawaban melaksanakan pembinaan kemasyarakatan guna meningkatkan kemampuan, dan kesadaran menjaga lingkungan sudah baik kepala dusun jika dilihat tidak mengalami kesulitan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya masyarakat dapat diajak bersama-sama menjaga lingkungan sekitar.

***Kata kunci:* kepala dusun, kinerja, tugas kewilayahan**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Desa memiliki Kewenangan Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain kewenangan yang dimiliki Desa, adapun Hak dan Kewajiban Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 yaitu :

a) Desa berhak :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan Hak Asal Usul, Adat Istiadat, dan Nilai Sosial Budaya masyarakat Desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

b) Desa berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Jika ditinjau dengan pandangan diatas tentunya desa tidak lepas dari pengaturan kepentingan masyarakat Desa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai tuntutan reformasi dan pemerataan pembangunan, maka Desa wajib menyusun peraturan sendiri (Peraturan Desa). Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yang berarti bahwa proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Selain itu, disebutkan pula bahwa Peraturan Desa yang mengatur Kewenangan Desa

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa tentunya tidak lepas dari perananan Pemerintah Desa, karena setiap Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka diperlukan adanya Pemerintah Desa yang dapat mengatur rumah tangga sebuah Desa tersebut. Maka terbentuklah Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Adapun yang dimaksud mengenai Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang merupakan Bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan atau Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa.

Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah Dusun. Kepala Dusun memiliki fungsi: pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan

penataan dan pengelolaan wilayah. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Seperti yang terjadi di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa Leses Nomor 2 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leses yang merupakan tindak lanjut atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Leses merupakan susunan organisasi dengan pola minimal yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 3 (tiga) orang dari unsur Sekretariat Desa, yakni Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan serta Kepala Urusan Perencanaan dan Umum, 2 (dua) orang dari Unsur Pelaksana Teknis yakni Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. Serta 2 (dua) unsur Pelaksana Kewilayahan, yakni dua Kepala Dusun yang terbagi atas 2 Padusunan, sehingga aparatur Pemerintah Desa Leses berjumlah 8 orang.

Bila dilihat dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2017 tentang Struktur Tata Kerja Pemerintah Desa. Desa Leses dalam penerapan Peraturan Bupati tersebut sudah sesuai dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa tidak hanya itu, jika dilihat dari kinerja Kepala Desa , Sekretaris Desa maupun Kaur dan Kasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun disini terdapat kendala dalam pelaksana kewilayahan yaitu Jika dilihat dari luas Desa leses, memiliki wilayah sebesar 151.8480 Ha dan jumlah 2.699 jiwa yang terdiri dari 2 unsur

Pelaksana Kewilayahan yang disebut Kadus atau dengan nama lain Kabayan yang membawahi 16 Padusunan, yang mana masing masing Kadus memimpin 8 Padusunan. Jumlah pelaksana kewilayahan di desa leses yang sedikit tentunya dipengaruhi oleh pendapatan asli desa yang rendah dalam penganggaran penghasilan perangkat desa.

Kepala dusun di Desa Leses sangat sedikit jumlahnya dan tidak sesuai dengan besarnya jumlah dusun. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap kinerja Kepala Dusun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Seperti halnya dalam menarik retribusi pajak, seorang Kadus harus menarik pajak sendiri setiap padusunan mengingat besarnya wilayah di setiap Padusunan. Permasalahan lainnya yaitu dengan adanya 2 kepala dusun yang membawahi setiap 8 padusunan kebanyakan kepala dusun lebih memprioritaskan padukuhan yang ditinggalinya, seperti pada kegiatan- kegiatan yang ada di masing masing padukuhan. Hal ini tentunya menyebabkan kecemburuan antar padukuhan yang lainnya. Sehingga hal tersebut menyebabkan kinerja kepala dusun dalam bidang lainya terhambat, tidak hanya itu dalam bidang mengayomi masyarakat tentunya juga kurang efektif karena kepala dusun tidak hanya membawahi satu padukuhan saja.

Selain itu Responibilitas Kepala Dusun Leses dalam mengatasi permasalahan seperti sengketa tanah yang sering terjadi di lingkup pedesaan sudah baik, dengan contoh ketika Kepala Dusun selalu mengedepankan musyawarah antar keluarga dalam menengahi permasalahan, karena kepala dusun tentunya menjadi seorang mediator dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Selain itu responibilitas kepala dusun dalam bergotong royong juga sudah baik, hal itu dibuktika ketika setiap gotong royong kepala dusun terlibat aktif sebagai penggerak masyarakat.

Penelitian ini menggunakan perspektif Government yang mana berusaha untuk mengetahui tentang Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses. Selain itu dengan perspektif government ini menjelaskan tentang institusi pemerintahan desa dalam hajat hidup orang banyak atau untuk mengetahui faktor faktor penyebab mengapa jumlah Kepala Dusun di Desa Leses hanya terdapat 2 orang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Produktivitas kepala dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan
2. kualitas pelayanan kepala dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan
3. Responsivitas kepala dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan
4. Responsibilitas kepala dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan
5. Akuntabilitas kepala dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan wawasan berpikir ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penulis sendiri maupun Pemerintah Desa Leses. Penelitian ini juga secara umum diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa, khususnya Pemerintahan pengetahuan khususnya di bidang Pemerintahan Desa.

F. Literature Review

1. Pada bagian pertama ini penelitian dilakukan oleh Melinda Ratna Agustina dalam jurnal yang berjudul evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kotabaru. Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal, Volume, II edisi 1, januari- juni 2013. Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyusunan organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi berdasarkan sejumlah teori organisasi yang ada. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap sejumlah informan yang dipilih berdasarkan tujuan dan secara snowball sampling ketika ditekan ada informasi lain yang dapat memberikan informasi secara valid.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyusunan SOTK pemerintahan kabupaten yang dilandaskan pada proses reorganisasi atau evaluasi kelembagaan tahun 2011 tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, terutama pada prinsip pembagian kerja atau spesialisasi, prinsip kesatuan komando/perintah dan prinsip rentang kontrol. Penerapan prinsip-prinsip pewadahan fungsi masih tidak sesuai, misalnya fungsi staf diwadahi dalam fungsi lain dan sebaliknya, demikian juga dengan perempuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan ketentuan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru memenuhi kriteria dengan pola maksimal dalam besaran organisasinya, hal ini nampaknya dimanfaatkan untuk menyusun organisasi Perangkat Daerah semaksimal mungkin, belum berdasarkan kebutuhan, kemampuan, potensi dan beban kerja. Di samping itu faktor kualitas sumber daya manusia anggota tim evaluasi kelembagaan masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah STOK yang sesuai prinsip-prinsip organisasi, serta masih terdapat intervensi politik dalam proses penyusunan terutama dari pihak legislatif, Kepala Daerah maupun pihak eksekutif sendiri yang menginginkan jabatan tertentu.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Albert A. Rapami, Muh Akmal Ibrahim, Nur Indrayati dan Nur Indar dalam jurnal yang berjudul kepemimpinan Kepala Kampung dalam pengelolaan Kepala Kampung (studi kasus kampung kampung di distrik sota Kabupaten Merauke Jurnal Sosial dan Politik Volume : 12 Nomor 2 Desember 2022. Dalam jurnal ini membahas tentang hasil penelitian menemukan bahwa karakteristik kepemimpinan dalam pengelolaan dana kampung di Distrik Sota menunjukkan hasil yang bervariasi. Dua kepala kampung yang menunjukkan karakteristik kepemimpinan ideal meliputi bertanggung jawab, jujur atau dapat dipercaya, tegas, konsisten, dan adil yaitu Kampung Erambu dan Kampung Yanggandur. Sedangkan tiga kampung lainnya

yaitu Kampung Sota, Kampung Toray dan Kampung Rawa Biru perlu melakukan perubahan dalam hal karakteristik dalam memimpin pemerintah kampung sehingga berdampak pada kinerja pengelolaan dana kampung masing-masing. Sementara gaya kepemimpinan kepala kampung dalam pengelolaan dana kampung di Distrik Sota ditemukan dua kampung yang memiliki kecenderungan penerapan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu kampung Erambu dan Kampung Yanggandur. Sedangkan Kepala Kampung Sota dan Toray menunjukkan gaya kepemimpinan yang otoriter dalam pengelolaan dana kampung. Adapun Kampung Rawa Biru, kepala kampungnya cenderung mengarah pada gaya kepemimpinan bebas (*Laissez faire*). Dan Faktor faktor penentu keberhasilan pengelolaan dana kampung pada kelima kampung di Distrik Sota, yaitu Kampung Sota, Kampung Toray, Kampung Erambu, Kampung Rawa Biru dan Kampung Yanggandur menunjukkan temuan yang sama. Dimana faktor-faktor penentu keberhasilan pengelolaan dana kampung pada lima kampung tersebut meliputi SDM aparatur pemerintah kampung dan SDM Badan Permusyawaratan Kampung, regulasi pemerintah pusat yang seringkali berubah-ubah dan tumpang tindih sehingga sulit mengerti dan dipahami oleh aparat kampung, dan partisipasi masyarakat yang rendah disebabkan warga lebih memilih untuk fokus pada mata pencaharian di hutan dengan berburu atau bertani/berkebun di tempat yang jauh dari kampung.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Berta Haryanti dalam jurnal yang berjudul fungsi dan peran kepala kampung dalam menjalankan tugas di kampung linggang mapan kecamatan linggang mapan kabupaten kutai barat *Journal Administrasi Negara* volume 3 nomor 4 tahun 2015. Dalam jurnal ini membahas tentang Kepala kampung dalam menjalankan Fungsi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kampung sudah dilaksanakan, walaupun masih belum sepenuhnya maksimal. Masih terdapat kendala-kendala dalam Penyelenggaraan Pemerintah, dan Kemasyarakatan di Kampung. Masih kurangnya musyawarah atau rapat-rapat Kampung. Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kampung sudah dilaksanakan, tetapi masih kurangnya peran RT dalam Pembinaan Kehidupan masyarakat Kampung. Sehingga pembinaan masyarakat masih sangat kurang dan belum sepenuhnya optimal dijalankan. Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Pengembangan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Kampung, sudah dijalankan tetapi belum sepenuhnya maksimal, dikarenakan masih kurangnya penyuluhan dan pengembangan di bidang pertanian. Faktor Penghambat Kurangnya fasilitas yang diberikan sehingga pelaksanaan dan fungsi serta peran Kepala Kampung belum sepenuhnya maksimal. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintahan Kampung, sehingga menjadi hambatan dalam pembangunan, dan kurangnya musyawarah kampung/rapat-rapat kampung, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan serta keputusan-keputusan yang ada di kampung serta Peran RT belum sepenuhnya dimaksimalkan, dalam urusan masyarakat kampung. Faktor Pendukung Fungsi dan Peran Kepala kampung dalam menjalankan tugas, didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan wilayah kecamatan. Selain itu juga fungsi dan peran Kepala Kampung di dukung oleh masyarakat Kampung dalam menjalankan tugasnya. Serta didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk memudahkan urusan, serta tugas-tugas yang ada di kantor Kepala Kampung dan adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah per tahunnya, untuk mengurus urusan Pemerintahan di Kampung, baik fasilitas-fasilitas di

kantor maupun untuk pembangunan serta pembinaan masyarakat yang ada di kampung.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Eren Arif Budiman, Samsul Tamher dan Fransiscus X Watkat dengan jurnal yang berjudul kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung trikora ditinjau dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum. Dalam jurnal ini membahas tentang kinerja Kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya sudah baik, tapi masih terdapat adanya beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja kepala Kampung dalam pelayanan publik, seperti masih belum adanya inovasi pelayanan, masih ada beberapa kebutuhan masyarakat yang sulit untuk dikenali oleh kepala kampung, belum adanya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik, serta masih adanya aparat pemerintah kampung yang bekerja tidak sesuai peraturan waktu yang telah ditentukan. Faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam hal ini perangkat lunak yaitu suatu pedoman atau aturan bagi pemerintah kampung dalam menjalankan tugasnya, sedangkan perangkat keras yaitu sarana prasarana yang harus banyak dilengkapi. Untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Maman Kartiman, Agus Nurul Syam dan Budi Setiad dengan jurnal berjudul Peran Kepala Dusun sebagai Unsur satuan tugas kewilayahan

dalam membantu Kepala Desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 02 nomor 02 september 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan Kepala Dusun sebagai Unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berperan secara optimal. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Kepala Dusun belum berperan selaku organisator dalam melaksanakan koordinasi dengan masyarakat yang ada di wilayahnya, hal ini dibuktikan dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya. Kepala Dusun belum berperan selaku fasilitator karena kepala dusun belum dapat memfasilitasi kebutuhan pemerintah desa terkait data kependudukan dan belum mampu menjadi mediator dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Kepala Dusun belum berperan selaku inovator karena kepala dusun belum dapat melakukan penataan dan pengelolaan wilayah yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dusun belum berperan selaku motivator karena kepala dusun belum optimal dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintah desa serta belum optimal dalam mengajak keterlibatan secara aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan, dengan contoh seperti banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan program pemerintah, sehingga harus dilaksanakannya sosialisasi sebagai upaya memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya program pemerintah.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Parjiyana Yendri Nazi, Made Devi Wedayanti dan Mardianto dalam jurnal yang berjudul Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5, No.2 Tahun 2019. Dalam jurnal ini membahas tentang Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Indikator Tugas dan Fungsi berada pada Skala Pengukuran Terlaksana. Namun masih terdapat kendala yang dimiliki yaitu pertama, tidak adanya kantor kepala dusun membuat proses koordinasi antara kepala desa dan kepala dusun kurang berjalan dengan baik. Kedua, Kepala Dusun mengatakan bahwa Luas wilayah dusun IV di desa kubang jaya terlalu luas sehingga banyak terdapat permasalahan yang terjadi di tingkat RT. Ketiga, Kepala dusun hanya berdiri sendiri, tidak sama seperti RT yang memiliki sekretaris RT, sehingga untuk administrasi Kepala Dusun tidak memiliki data yang lengkap.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Folce Elden Palyama dalam jurnal yang berjudul evaluasi kinerja kepala kampung wilion dalam pemerintah dengan di wilayah distrik wemak kabupaten sorong. Jurnal ELITIS Social Scienc Vol.1, No. 1, Agustus 2021. Dalam jurnal ini membahas tentang Pemerintah Desa Wiloin distrik wemak kabupaten sorong dalam melaksanakan segala kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan NKRI, desa atau kelurahan merupakan lembaga pemerintahan terbawah. Desa adalah

gabungan dari beberapa dusun dan Rukun Warga (RW). Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa. Dusun dikepalai oleh kepala dusun (kadus) atau kepala punduh (kapuh). Sedangkan rukun warga merupakan gabungan dari beberapa Rukun Tetangga (RW). Susunan pemerintahan desa dan kelurahan dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten/kota. Misalnya di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan desa melalui peraturan desa yang meliputi RT, RW, Dusun, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (PERDA) setempat. Dalam rangka meningkatkan citra kerja dan kinerja instansi pemerintahan menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance). Perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi Pemerintah Desa yang dapat dijadikan contoh sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional di seluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi Pemerintah secara terpadu, akan tetapi efektivitas kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi belum tentu dapat diterapkan dengan baik dan maksimal. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas kinerja sangat diharapkan guna terciptanya Pemerintahan yang baik. Dengan demikian diharapkan dengan adanya efektivitas kinerja yang baik akan dapat membantu pengelolaan manajemen utamanya penyediaan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga tujuan efektivitas kinerja dalam suatu desa dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

8. Penelitian ini dilakukan oleh Denanda Putri Adhilani dan Farida Hanum dalam jurnal yang berjudul konflik pemilihan kepala dusun Depok Ambarketawang Gamping

Sleman Yogyakarta . Jurnal Kajian Sosiologi Vol 8 No 2 September 2019. Dalam jurnal ini membahas tentang konflik pemilihan kepala dusun melalui musyawarah dusun dan tes. Faktor penyebab konflik tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah yang baru, dukuh terpilih tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang calon dukuh, dan adanya pengaruh dari kelompok tertentu. Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik pada pemilihan kepala dusun tersebut antara lain kepala desa berusaha menjelaskan peraturan daerah yang baru pada masyarakat, negosiasi yang dilakukan oleh kepala desa, mediasi mempertemukan dukuh terpilih dengan masyarakat, dan dukuh terpilih mengundurkan diri.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Nola Karunggu, Welson.Y.Rompas, dan Femy.M.G.Tulusan dalam jurnal yang berjudul Kinerja Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pembangunan Desa Di Kampung Nduma Distrik Mapnduma Kabupaten Nduga. Jurnal Administrasi Publik Vol 2. No 029 2015. Dalam jurnal ini membahas tentang kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pembangunan yaitu sebagai Kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung (seperti memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pengaturan kehidupan masyarakat desa, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan kampung, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan kepada masyarakat) adalah belum optimal namun umumnya sudah cukup baik. Kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan pembangunan juga masih perlu ditingkatkan. Dalam rangka itu kepala kampung harus dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi lebih baik dengan semua unsur

terutama dengan BPD/MTT, LPM, PKK, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat.

10. Penelitian ini dilakukan oleh Natalia Bulan dan FI. Sudiran dalam jurnal yang berjudul Kepemimpinan Kepala Kampung dan efektivitas dana Kampung di kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu. Jurnal Administrasi Publik Vol 2. No 2 2018. Dalam jurnal ini membahas hasil analisa terhadap kepemimpinan kepala kampung dalam hubungannya dengan efektivitas penggunaan dana kampung di Ujoh Bilang maka didapatkan hasil sebesar 4,22. Berdasarkan interpretasi terhadap nilai tersebut maka dapat dikategorikan bahwa kepemimpinan kepala kampung dalam hubungannya efektivitas penggunaan dana kampung di Ujoh Bilang adalah termasuk baik.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang kinerja. Tapi dalam penelitian ini mengkaitkan dengan kinerja Kepala Dusun. Sedangkan penelitian yang lainnya bukan membahas tentang kinerja Kepala Dusun. Kemudian perbedaan lainnya yaitu penelitian ini dilakukan di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten sedangkan dalam penelitian terdahulu dilakukan di luar Kabupaten Klaten.

G. Kerangka Konsep

1. Pengertian Kinerja

Kinerja menurut Sinambela, dkk (2013:5), kinerja pegawai merupakan kemampuan dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kedepannya. Kemudian menurut Sutrisno (2016) Kinerja merupakan kesuksesan seseorang

dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai diartikan sebagai kemampuan atau energi pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Pada suatu kinerja seseorang ataupun kelompok dalam organisasi dapat melakukan tugas yang diberikan sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan waktu yang ditugaska dengan baik.

Afandi (2018: 149), kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai atau capaian seseorang atau kelompok dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral/etika.

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat dicapai sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dan tidak bertentangan dengan moral/etika, dengan adanya kinerja ini akan mendapatkan hasil kerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi.

Sedarmayanti (2014: 259-260): kinerja adalah sesuatu hasil yang dikerjakan, mengandung pengertian hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat dicapai oleh seseorang/kelompok organisasi sesuai tanggungjawab masing-masing, dengan adanya ini maka akan menciptakan sesuatu hasil dari apa yang dikerjakan.

(2013: 214) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil hasil dari fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil dari pekerjaan seseorang ataupun kelompok yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan.

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (206:50-51) indikator kinerja pegawai meliputi:

A. Produktivitas kerja yang memiliki ukuran pokok diantaranya:

1. Sikap pegawai, dimana dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien.
2. Kemampuan, dimana aparatur memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.
3. Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas.

- B. Kualitas pelayanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas.
- C. Responsivitas adalah kemampuan aparat untuk menggali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- D. Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
- E. Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah Sikap pegawai, dimana dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien. Kemampuan, dimana aparatur memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas. Kualitas pelayanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika Prawiroesentono (dalam Sinambela, dkk (2012:5).

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja dalam suatu organisasi dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dengan tidak melanggar hukum, maka dengan ini akan dapat tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan secara legal.

Sedangkan menurut Hersey (dalam sinambela, dkk (2012:7), mengatakan bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan kemampuan tertentu, karena mengerjakan tanpa pemahaman yang jelas tidaklah cukup efektif.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Menurut Kasmir, (2015 : 189) berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kinerja:

1. Kemampuan dan keahlian, karyawan yang memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik, maka akan memberikan kinerja baik pula, demikian pula sebaliknya.
2. Pengetahuan, dengan mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan akan memudahkan seseorang untuk melakukan pekerjaannya.

3. Rancangan kerja, jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan secara tepat dan benar begitu juga sebaliknya.
4. Kepribadian, seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik, akan dapat melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab sehingga hasil pekerjaannya juga baik.
5. Motivasi kerja, jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya, maka karyawan akan terangsang atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik.
6. Kepemimpinan, perilaku seseorang dalam mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya.
7. Gaya kepemimpinan, gaya atau sikap seorang pemimpin dalam menghadapi atau memerintah bawahannya.
8. Budaya organisasi, kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.
9. Kepuasan kerja, perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan.
10. Lingkungan kerja, suatu kondisi atau suasana di sekitar lokasi tempat bekerja.
11. Loyalitas, kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela perusahaan di mana tempatnya bekerja.
12. Komitmen, kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan perusahaan dalam bekerja.

13. Disiplin kerja, usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh.

Sedangkan menurut Sembiring (2012 : 85), penyebab sukses dan kurang sukses organisasi dalam mencapai kinerjanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Faktor-faktor individual Faktor-faktor individual adalah semua faktor yang bersumber dari individu pegawai termasuk pimpinan sebagai contoh: tingkat motivasi, komitmen, keahlian, pengetahuan, kemampuan berpikir, dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor sistem Faktor-faktor sistem yaitu semua faktor yang berada dan bersumber diluar kendali para pegawai secara individual. Sebagai contoh: prosedur kerja yang buruk, komunikasi yang buruk, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sebagainya.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Kemampuan dan keahlian, karyawan yang memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik, maka akan memberikan kinerja baik pula, demikian pula sebaliknya. Rancangan kerja, jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan secara tepat dan benar begitu juga sebaliknya. Kepribadian, seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik, akan dapat melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab sehingga hasil pekerjaannya juga baik. Motivasi kerja, jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya, maka karyawan akan terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik. Sehingga Kinerja pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat sangat

dipengaruhi oleh keahlian dan kecakapan aparatnya, terutama mengenai kecakapan kerja yang dimilikinya selama mereka menempati posisi sebagai lembaga pelayanan. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja yang ada di dalam lingkungan lembaga pemerintah yang bersangkutan. Kinerja sendiri pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkatan, pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Beberapa konsep indikator lagi tentang penilaian terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah desa sebagai konsistensi pencapaian tujuan, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

3. Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Desa Leses Nomor 2 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Leses, yang merupakan tindak lanjut

atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai:

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga. Pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa, dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi

pemerintahan, yakni Kepala Urusan Keuangan serta Kepala Urusan Perencanaan Dan Umum.

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi;

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasi aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisikan data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala Urusan memiliki berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala urusan perencanaan dan umum mempunyai tugas:

1. Penyiapan bahan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Inventarisasi data-data pembangunan.
3. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi program.
4. Penyusunan laporan pelaksanaan APBDesa.
5. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
6. Penataan Administrasi perangkat desa.
7. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
8. pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta
9. penyiapan rapat, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Sedangkan Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi;

1. Penyiapan bahan pengurusan administrasi dan penatausahaan keuangan
2. pengerjaan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
3. Penyiapan bahan verifikasi administrasi keuangan, serta
4. Penyiapan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Operasional BPD, dan insentif lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi ;

1. Pelaksanaan manajemen Pemerintah Desa
2. Penyusunan rancangan regulasi desa
3. Pembinaan bidang pertanahan
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
6. Pengelolaan administrasi kependudukan
7. Penataan dan pengelolaan wilayah, serta
8. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa

Sedangkan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi;

1. Pengeordinasian pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
2. Pengeordinasian pembangunan bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan
3. Penanganan masalah sosial dan kebencanaan
4. Pelaksanaan sosialisasi motivasi masyarakat bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
6. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat, serta
7. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pelaksana Kewilayahan atau disebut dengan nama lain merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas kewilayahan tersebut meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayah Dusun. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun memiliki fungsi;

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
2. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
3. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, serta
4. Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari Peraturan Desa diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai Menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Berdasarkan Pasal 4 Bab II Tentang Struktur Organisasi dan Fungsi dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah:

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten tahun Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab III Paragraf 3 Pelaksana Kewilayahan Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

4. Pelaksana kewilayahan

Kepala Dusun atau kadus bertugas untuk membantu Kepala Desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat. Tugas Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Fungsi kepala dusun dalam membantu Kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala kewilayahan/ Kepala Dusun memiliki fungsi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Kepala Kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 4 Ayat 3). Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kewilayahan memiliki fungsi;

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Dusun adalah sebutan Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis lapangan dan kepala kewilayahan. Pelaksana Teknis Lapangan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Desa. Kepala Dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Tugas Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa sebagai Kepala Kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis tentang Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses, termasuk dalam jenis penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Alasan menggunakan metode ini adalah guna untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial yang ada di lapangan. Sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data atau dokumen kegiatan yang akan diteliti oleh penulis.

2. Metode/ teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode atau teknik yang akan dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu

dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Banyaknya periode yang perlu dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode observasi tergantung pada jenis data yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini peneliti terjun dan mengamati secara langsung keseharian kepala dusun yang ada di desa leses dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan di Desa Leses dan peneliti juga memperhatikan kinerja kepala dusun dalam mengatur wilayahnya. Dalam hal ini kinerja kepala dusun tersebut masih dirasa kurang maksimal karena jika dilihat pada saat peneliti praktikum dan tinggal di wilayah leses kepala dusun sedikit lebih mementingkan padukuhan yang ditinggalinya dari pada padukuhan yang lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang topic penelitian.

Wawancara mendalam merupakan proses penggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam proses wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab dengan informan secara langsung agar setiap informasi yang diperoleh peneliti lebih maksimal dan dibantu menggunakan perekam audio untuk merekam setiap percakapan antara peneliti dengan informan. Peneliti pada saat wawancara yaitu pertama wawancara dengan Kepala Desa leses, kedua dengan sekertaris Desa, ketiga dengan kepala dusun 1, keempat dengan kepala dusun 2, kelima dengan ketua LPMD, keenam dengan ketua karang taruna, dan

ketujuh dengan salah satu masyarakat Desa Leses. Dalam setiap proses wawancara ini peneliti dibantu dengan alat bantu merekam agar dapat di ulang kembali dan memudahkan peneliti untuk menulis penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri dokumen atau data historis mengenai seseorang atau suatu peristiwa. Dokumentasi. Dokumen yang diperlukan peneliti untuk mencari data-data seperti, hasil wawancara dari berbagai narasumber, foto catatan penelitian dan dokumen RPJMDes. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen tulisan maupun gambar seperti Profil Desa Leses yang berisi tentang gambaran umum dari sejarah Desa Leses, Kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi ekonomi Desa Leses. Kemudian tugas dari pelaksana kewilayahan yang berisi tentang unsur pembantu kepala desa sebagai tugas kewilayahan, tugas kewilayahan tersebut meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pelaksanaan kewilayahan ini dilaksanakan oleh kepala dusun. Untuk dokumen lainnya gambar wawancara peneliti dengan informan. Peneliti mendapatkan RPJMDesa dan catatan-catatan diperoleh melalui wawancara berbagai narasumber.

3. Unit analisis

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responibilitas, dan Akuntabilitas Kinerja Kepala Dusun.

c. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1

NO	Nama	Umur	Jabatan	Tingkat pendidikan	Jenis kelamin
1.	H. Puryanto	63	Lurah	SLTP	Laki-laki
2.	Fokus Wahyudi <i>S</i>	35	Carik	Sarjana	Laki-laki
3.	Krismanto <i>u</i>	56	Kepala Dusun 1	SLTA	Laki-laki
4.	Heru Widodo <i>m</i>	50	Kepala Dusun 2	SLTA	Laki-laki
5.	Bohyamin <i>b</i>	60	Ketua LPMD	SLTA	Laki-laki
6.	Diki Dian P <i>e</i>	23	Ketua Karang Taruna	SMK	Laki-laki
7.	Sumanto <i>r</i>	65	Masyarakat Dk.Leses	SD	Laki-laki
8.	Dika <i>r</i>	20	Masyarakat Dk.Gamblok	SMK	Laki-laki
9.	Brahim.SAg.,M.pd	60	Ketua BPD	Sarjana	Laki- laki
10.	Sumartini	50	Kader PKK	SLTA	Perempuan
11.	Maryanto	50	Ketua RT 01	SLTA	Laki-laki
12.	M. Raffly Reyhan Dhadhillah S.IP. <i>a</i>	22	Masyarakat Dk.Dadirejo	Sarjana	Laki-laki

ta Primer 2023

4. Teknik analisis data

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis yang digunakan bertujuan Untuk menyajikan data lebih bermakna dan mudah dipahami maka langkah analisis data dalam penyajian ini adalah *analysis interactive model* dari Miles Haberman dalam Sugiyono (2015:246) dengan langkah langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami, yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi data

Data yang telah terkumpul selanjutnya direduksi guna memilih data yang relevan dan bermakna untuk disajikan. Dalam proses reduksi data peneliti melakukan seleksi, memilih dan memilih data yang relevan dan bermakna. Memfokuskan pada data yang menjurus untuk pemecahan masalah, penemuan pemaknaan untuk atau secara sistematis dan menjabarkan hal-hal yang penting tentang temuan dan maknanya. Dalam proses reduksi, data merupakan analisis yang menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting dan mengorganisasikan data yang memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan

Reduksi data yang diperoleh penulis dilapangan tentang Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dengan wawancara, observasi serta dokumentasi yang sudah di fokuskan pada hal yang berkaitan dengan

Produktivitas kepala dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan kualitas pelayanan Responsivitas kepala dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan, Responsibilitas kepala dusun, Akuntabilitas kepala dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan.

c. Penyajian Data

Penyajian data berupa tulisan atau kata-kata, tabel gambar dan grafik. Maksud dari sajian data adalah untuk menggabungkan informasi satu dengan yang lain sehingga tersusun dalam suatu susunan dan bentuk yang mudah dimengerti sehingga dapat menggambarkan situasi yang terjadi. Hasil catatan lapangan yang telah direduksi disusun dengan baik, dan untuk mempermudah pengelompokan masalah, maka masing-masing diberi kode.

Penyajian data dalam penelitian ini diperlukan agar dapat mempermudah peneliti menguasai informasi yang diperoleh dilapangan. Dengan demikian dari pengamatan serta mendapatkan hasil dari riset yang dicoba hingga bisa disajikan ataupun dijabarkan dalam wujud narasi.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Seperti proses reduksi data, setelah data yang terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya dirumuskan kesimpulan sementara dan setelah data yang dibutuhkan benar-benar lengkap maka ditarik kesimpulan akhir.

Penarikan kesimpulan ini data yang diperoleh dari lapangan dengan terhimpun dari suatu penelitian kemudian menuju ke arah kesimpulan.

BAB II

PROFIL DESA

A. Sejarah Desa Leses

Dahulu pada tahun 1901 seorang abdi dalem Keraton Surakarta yang bernama Kyai Noyo Dipo yang mengadakan tirakat atau lelaku. Yang pada waktu itu diikuti oleh dua abdinya. Tetapi sesampainya di perbatasan Yogyakarta hari sudah petang sehingga mereka menyempatkan untuk beristirahat dan bisa tidur dengan nyenyak sehingga tidak terasa hari sudah siang. Pada waktu itu Kyai Noyo Dipo bangun dan segera membangunkan kedua abdinya, selanjutnya berbicara pada abdinya tersebut; “hai kedua abdi, bilamana nanti ada renjingan jaman, makan tempat ini saya beri nama ngleles” Setelah beberapa kurun waktu kemudian tempat tersebut menjadi hunian penduduk yang aman dan damai, sehingga saat ini bernama Desa Leses.

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1942, Desa Leses dipimpin oleh seorang demang yang bernama Ki Demang Pairo Tanoyo, yang di bantu oleh perabot Desa, yaitu Jogo Boyo dan Kami Tuo. Kemudian pada tahun 1952 diganti oleh Lurah Desa yang bernama Dulhadi dan dibantu Carik Desa bernama

Sastro Harjo dengan 3 Kabayan dan Ulu-ulu. Berakhir pada tahun 1965 yang dilanjutkan Carik Desa menjadi Pejabat Sementara Kepala Desa sampai tahun 1974.

Kemudian pada tahun 1974 diadakan pemilihan Kepala Desa, yang akhirnya Kepala Desa dijabat oleh Bapak Dulngalim hingga tahun 1986. Kemudian atas hasil pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh Bapak Tugiman yang menjabat Kepala Desa dan berakhir pada tahun 1998.

Kemudian pada tahun 1998 di laksanakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak Puryanto yang berhasil menjabat Kepala Desa selama 2 (dua) periode dan berakhir pada tahun 2013. Selanjutnya pada pemilihan Kepala Desa tahun 2013, berhasil menempatkan Bapak Purwanto sebagai Kepala Desa yang menjabat selama 1 (satu) periode kepemimpinan yakni hingga bulan Mei 2019. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Leses yang dilaksanakan serentak se-Kabupaten Klaten pada tahun 2019, kepemimpinan Desa Leses kembali dipegang oleh Bapak H.Purwanto sampai sekarang.

B. KONDISI GEOGRAFIS

a. Letak

Secara geografis Desa Leses terletak pada 6° 51' 46" LS dan 109° 40' 19" LU sampai dengan 110° 03' 06" BT. Secara administrasi Desa Leses termasuk dalam Wilayah Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan salah satu Desa yang berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Desa Leses yang letak geografisnya berada di sebelah selatan gunung merapi dengan topografi yang datar dengan kemiringan tanah rata-rata suhu 10% - 20%,

dan berada pada ketinggian ± 600 mdpl, beriklim sejak rata-rata suhu 27° C serta curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 3.000 – 3.500 mm pertahun.

Desa Leses yang masuk dalam wilayah Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Taskombang dan Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo
- b) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kepurun dan Desa Sapen Kecamatan Manisrenggo
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebonallas Kecamatan Manisrenggo

b. Luas

Wilayah Desa Leses dengan total luas $\pm 151,8480$ Ha terdiri dari :

Pemukiman	:	31,9625 Ha
a) Sawah $\frac{1}{2}$ irigas teknis	:	116,0000 Ha
b) Sawah tadah hujan	:	- Ha
c) Perkebunan rakyat	:	- Ha
d) Perkantoran	:	0,1000 Ha
e) Sekolah	:	0,2000 Ha
f) Kolam	:	0,2000 Ha
g) Lapangan	:	- Ha

c. Wilayah

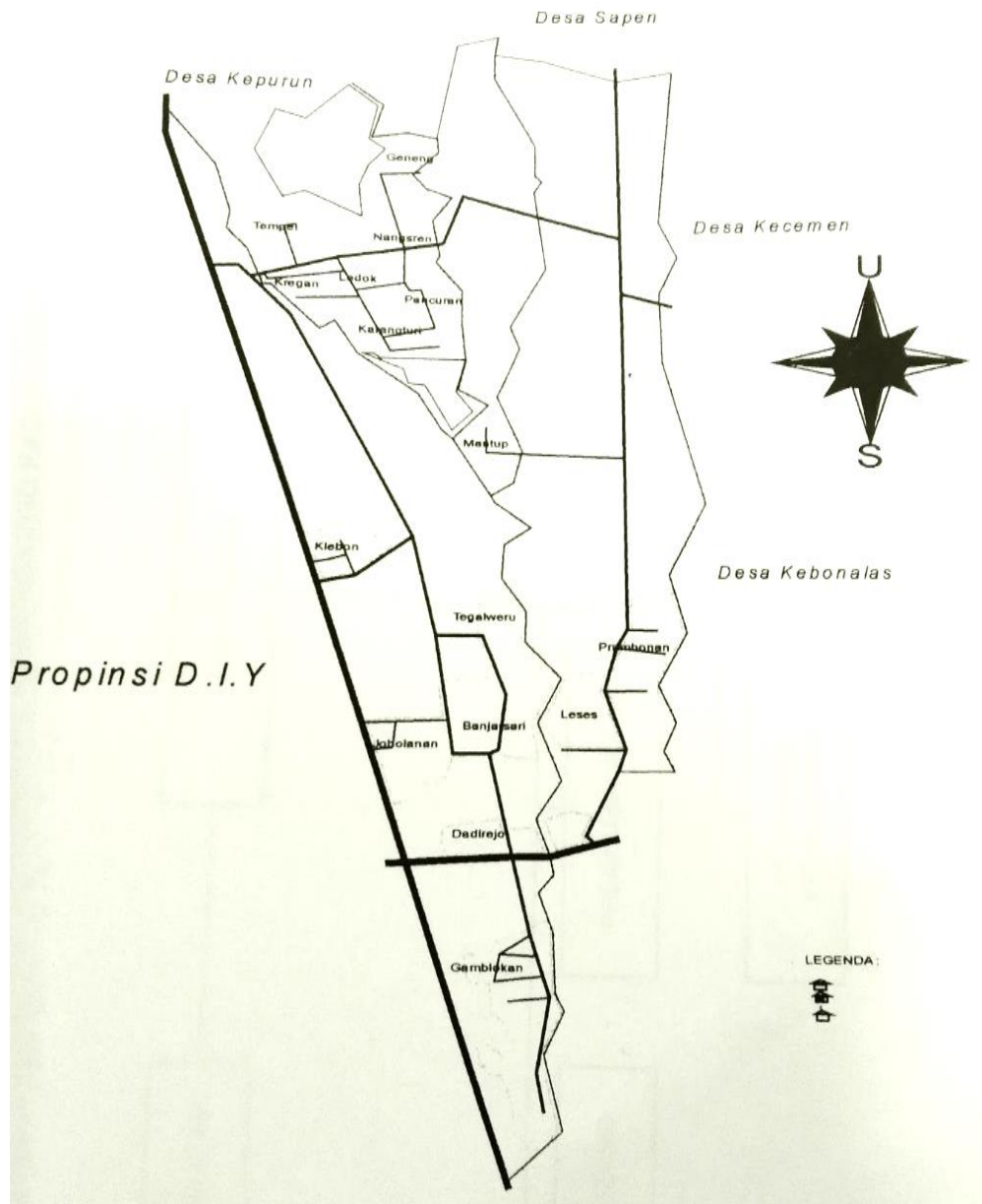
Desa Leses memiliki wilayah bawahan sejumlah 2 (dua) padusunan. Padusunan yang pertama membawahi 9 RW, 17 RT, dan 10 dukuh yaitu Leses,

Prambonan, Mantup, Pancuran, Karangturi, Ledok, kregan, Tempel, Geneng, dan Nangsren.

Sedangkan padusunan yang kedua membawahi 4 RW, 8 RT, dan 6 dukuh yaitu Gamblokan, Dadirejo, Joholanan, Banjarsari, Tegalweru, dan Klebon.

2.1 Peta Desa Leses

PETA LOKASI
DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO
KABUPATEN KLATEN



Sumber: Data Primer 2023

C. KONDISI DEMOGRAFIS

Masyarakat Desa Leses merupakan komunitas masyarakat yang membaaur dalam suasana kehidupan yang baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi hal ini didukung dengan kegiatan sosial yang dimiliki berupa kegiatan keagamaan di lingkungan masjid atau mushola di masing-masing wilayah, paguyuban rutin tokoh masyarakat di setiap wilayah dusun, pertemuan rutin yang warga atau selapanan di tingkat RW, adanya pertemuan rutin Karang Taruna di tingkat desa dan organisasi kepemudaan di tingkat RW, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, serta dilestarikannya kegiatan gotong royong dan adat istiadat dikalangan masyarakat serta didorong dengan rasa kebersamaan yang kuat. Desa Leses memiliki penduduk sebesar 2.699 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.373 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.326 jiwa.

Tabel 2.1

NO	Kelompok usia	Jumlah
1.	0-9 tahun	334
2.	10-19 tahun	340
3.	20-29 tahun	342
4.	30-39 tahun	435
5.	40-49 tahun	414
6.	50-59 tahun	371
7.	60-69 tahun	248
8.	=>70 tahun	215
Total		2.699

1. Daftar penduduk berdasarkan umur

Sumber : RPJMDes Desa Leses 2020

Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa jumlah penduduk yang terbanyak pada umur 30-39 tahun dengan jumlah 435 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit pada umur lebih dari 70 tahun dengan jumlah 215 orang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa umur masyarakat yang ada di Desa Leses bisa dibilang masih banyak yang produktif.

Tabel 2.2

2. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	539
2.	Belum tamat SD/ sederajat	247
3.	Tamat SD/sederajat	547
4.	SLTP sederajat	444
5.	SLTA sederajat	835
6.	Diploma I/II	17
7.	Akademi /Diploma III/sarjana muda	22
8.	Diploma IV /strata I	46
9.	Strata II	2
10.	Strata III	-
<i>Total</i>		2.699

Sumber : RPJMDes Desa Leses 2020

Berdasarkan pada tabel diatas diartikan bahwa masyarakat yang ada di Desa Leses jumlah penduduk berdasarkan pendidikan paling banyak yaitu SLTA (SMA) sederajat dengan jumlah yaitu 835 orang. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Leses sudah banyak yang memenuhi syarat minimum pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat. Dengan ini maka masyarakat setidaknya paham apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Leses dalam program-program pembangunan agar dapat terciptanya Desa Leses yang semakin maju.

Tabel 2.3

Jumlah penduduk berdasarkan agama

NO.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.679

2.	Kristen Protestan	15
3.	Katolik	5
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Penganut aliran kepercayaan	-
	Total	2.699

Sumber : RPJMDes Desa Leses 2020

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diartikan bahwa penduduk yang beragama paling banyak yaitu Islam dengan jumlah 2.679 orang. Sedangkan yang beragama kristen protestan dengan jumlah 15 orang dan yang beragama katolik berjumlah 5 orang. Dengan adanya masyarakat yang agamis maka masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya dengan aman, bermartabat, sehat, dan sejahtera sesuai dengan visi misi Desa Leses.

D. Keadaan Ekonomi

Gambaran umum mengenai kondisi ekonomi masyarakat Desa Leses dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana.

Pekerjaan masyarakat Desa Leses sangat penting, salah satunya adalah untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, maka dari itu dapat di lihat pekerjaan masyarakat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	508
2.	Mengurus Rumah Tangga	394
3.	Pelajar/ Mahasiswa	372
4.	Pegawai Negeri Sipil	31
5.	Tentara Nasional Indonesia	4
6.	Kepolisian RI	2
7.	Perdagangan	47
8.	Petani/ Pekebun	128
9.	Transportasi	2
10.	Karyawan Swasta	172
11.	Karyawan BUMN	3
12.	Karyawan BUMD	1
13.	Karyawan Honoror	7
14.	Buruh Harian Lepas	604
15.	Buruh Tani/ Perkebunan	219
16.	Pembantu Rumah Tangga	3
17.	Tukang Batu	22
18.	Tukang Kayu	6
19.	Tukang Las/ Pandai Besi	1
20.	Tukang Jahit	7
21.	Penata Rambut	1
22.	Paraji	1
23.	Dosen	1
24.	Guru	5
25.	Bidan	1
26.	Sopir	4
27.	Pedagang	2
28.	Perangkat Desa	7
29.	Kepala Desa	1
30.	Wiraswasta	6
31.	Mekanik	4
32.	Peternak	2
Total		2.699

Sumber : RPJMDes Desa Leses 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak dalam pekerjaan adalah buruh harian lepas dengan jumlah 604 orang, untuk yang belum bekerja sebanyak 508 orang, mengurus rumah tangga 394 orang, pelajar atau mahasiswa 371 orang, buruh tani/perkebunana 219 orang, karyawan swasta 172 orang, petani/pekebun 128 orang, perdagangan 47 orang, dan untuk pegawai negeri sipil berjumlah 31 orang. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Leses mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas.

Tabel 2.5

Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2019 :

No	Dusun	RW	RT	Dukuh	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun 1	05	08	Leses	34	32	66
			09	Leses	42	47	89
		06	10	Prambonan	71	66	137
			11	Prambonan	76	72	148
		07	12	Mantup	45	37	82
		08	13	Pancuran	62	58	120
		09	14	Karangturi	35	39	74
		09	15	Karangturi	34	32	66
			16	Ledok	42	48	90
		10	17	Kregan	46	40	86
			18	Ledok	44	38	82
		11	19	Tempel	49	49	98
			20	Tempel	39	38	77
			21	Tempel	46	37	83
		12	22	Geneng	46	44	90
23	Geneng		59	52	111		
13	24	Nangsren	60	60	120		
2	Dusun 2	01	01	Gamblokan	83	89	172
			02	Gamblokan	108	104	212
			26	Dadirejo	26	34	60
		02	03	Joholanan	105	107	212
		03	04	Banjarsari	71	71	142
			05	Banjarsari	45	44	89
			06	Tegalweru	34	30	64
04	07	Klebon	71	58	129		

Total	1.373	1.326	2.699
-------	-------	-------	-------

Sumber : RPJMDes Desa Leses 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah RT dan RW didusun 1 ada 17 RT dan 10 RW dengan satu kepala dusun mewilayahi 10 padukuhan yaitu Leses, Prambonan, Mantup, Pancuran, Karangturi, Ledok, Kregan, Tempel, Geneng, dan Nangsren. Dan untuk Dusun 2 dengan jumlah RT dan RW berjumlah 8 RT dan 4 RW dengan mewilayahi padukuhan Gamblokan, Dadirejo, Banjarsari, Tegalweru, dan Klebon. Untuk jumlah total penduduk dari semua padukuhan yang laki-laki berjumlah 1.373 penduduk dan untuk yang perempuan berjumlah 1.326 penduduk, jadi keseluruhan total dari jumlah tersebut 2.699 penduduk.

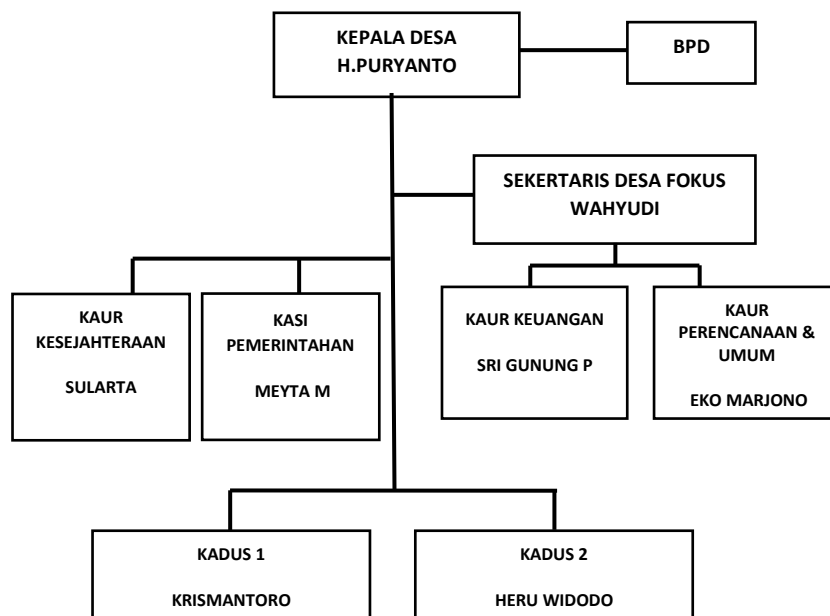
E. Pemerintahan

1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri dari atas Kepala Desa dibantu Perangkat Desa. Sesuai dengan Peraturan Desa Leses Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leses, yang merupakan tindak lanjut atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Leses menerapkan susunan organisasi dengan pola, yakni terdiri dari : Sekertaris Desa, Kaur Perencanaan dan Umum, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kasi Pemerintahan dan 2 (dua) Kepala Dusun yang membawahi 25 RT dan 13 RW.

2.6 Struktur Pemerintah Desa Leses

Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Leses



Sumber : RPJMDes Desa Leses 2020

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggaraan Pemerintah Desa, melaksanakan pemebangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemeberdayaan masyaraka. Kemudian untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan Peraturan di Desa, pembinaan pemerintahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi, kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, keragaman dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahragan dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sekertaris Desa dan dibantu dengan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan yakni kepala urusan keuangan serta kepala urusan perencanaan dan umum. Sekertaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala Urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala Urusan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Inventarisasi data-data pembangunan.
3. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi program.
4. Penyusunan laporan pelaksanaan APBDesa.
5. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
6. Penataan administrasi Perangkat Desa.
7. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
8. Pengadministrasian aset, inventarisasi perjalanan dinas.
9. Penyiapan rapat, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Sedangkan kepala urusan keuangan memiliki fungsi :

1. Penyiapan bahan pengurusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
2. Pengerjaan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
3. Penyiapan bahan verifikasi administrasi keuangan.
4. Penyiapan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, operasional BPD dan insentif lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari 2 (dua) seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh kepala seksi untuk melaksanakan tugasnya. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan manajemen pemerintahan desa.
2. Penyusunan rancangan regulasi desa.
3. Pembinaan bidang pertanahan.
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
6. Pengelolaan administrasi kependudukan.
7. Penataan dan pengelolaan wilayah.
8. Pendataan dan pengelolaan profil desa.

Sedangkan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi sebagai :

1. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan.
2. Pengoordinasian pembangunan bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan.
3. Penanganan masalah sosial dan kebencanaan.

4. Pelaksanaan sosialisasi motivasi masyarakat bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
6. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat.
7. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

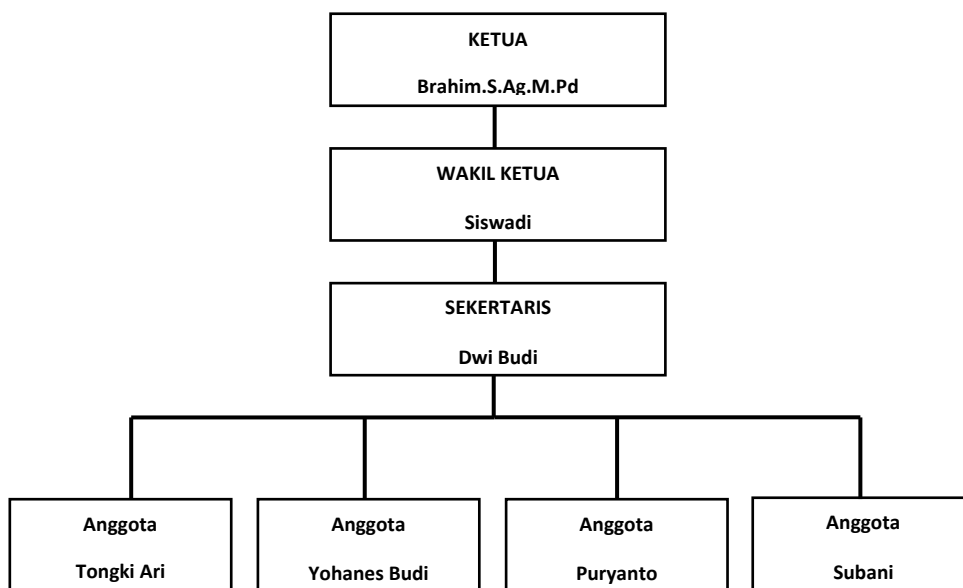
Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas dari pelaksana kewilayahan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh seorang kepala dusun. Kepala dusun bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun. Kepala dusun memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk dengan tujuan sebagai penyaring aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa Leses dan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa Leses. BPD di Desa Leses ini memiliki tupoksi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat dan membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Leses ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2.7 Struktur Badan Permusyawaratan Desa.



Sumber : RPJMDes Desa Leses 2020

3. Visi dan Misi Desa Leses

a. Visi

Mewujudkan Desa Leses yang Agamis, Aman, Bermartabat, Sehat dan Sejahtera.

b. Misi

- 1) Mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional, bersih dan berwibawa.
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang maju dan mandiri.
- 4) Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang di bidang kesehatan, pendidikan dan kependudukan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal.
- 6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kaidah hukum dan norma yang berlaku.
- 7) Mengedepankan kepedulian sosial bermasyarakat dengan semangat kegotong-royongan guna mencapai kesejahteraan umum.

F. Luas kewilayahan, jumlah penduduk di padukuhan dan Sarana prasarana

1. Luas kewilayahan, jumlah penduduk di padukuhan

Untuk wilayah dusun 1 kepala dusun mewilayahi 10 padukuhan yaitu Leses, Prambonan, Mantup, Pancuran, Karangturi, Ledok, Kregan, Tempel, Geneng, dan Nangsren dengan jumlah RT dan RW didusun 1 ada 17 RT dan 10 RW. Jumlah

penduduk yang diwilayahi oleh kepala dusun 1 dengan jumlah laki-laki 830 jiwa dan perempuan 789 jiwa sehingga total dari dusun 1 berjumlah 1.619 jiwa.

Untuk wilayah dusun 2 kepala dusun mewilayahi mewilayahi padukuhan Gamblokan, Dadirejo, Banjarsari, Tegalweru, dan Klebon dengan jumlah RT dan RW berjumlah 8 RT dan 4 RW. Jumlah penduduk yang diwilayahi oleh kepala dusun 2 dengan jumlah laki-laki 543 jiwa dan perempuan jumlah 537 jiwa sehingga total dari dusun 2 berjumlah 1.080 jiwa.

Untuk luas wiayah berdasarkan peta yang di wilayahi oleh setiap kepala dusun di Desa Leses belum ada, maka dari ini sangat disayangkan sekali jika kepala dusun tidak mempunyai peta wilayah dan luas yang diwilayahinya.

2. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Leses

1. Sarana dan Prasarana keagamaan

Mayoritas masyarakat di wilayah Desa Leses beragama islam. Dari seluruh wilayah Desa Leses ada sebanyak 7 masjid yang berada di Padukuhan Gamblokan, padukuhan Banjarsari, padukuhan Nangsren, padukuhan Prambonan, padukuhan Leses, padukuhan Pancuran, dan padukuhan Klebon. Dan ada 4 musholla yang berada di padukuhan tempel, padukuhan joholanan, padukuhan dadirejo, dan padukuhan geneng.

2. Sarana dan prasarana pendidikan

Sarana dan prasaran yang berada di wilayah Desa Leses ada 1 Sekolah Dasara (SD), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Taman kanak-kanak (TK), dan 1 Kelompok Belajar (KB).

1. Pendidikan kelompok belajar (KB Istiqomah) yang berada di padukuhan dadirejo
2. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK Pertiwi Leses) yang berada di padukuhan dadirejo
3. Pendidikan Sekolah Dasar (SDN 2 Leses) yang berada di padukuhan dadirejo
4. Pendidikan SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Qur'an) di padukuhan Prambonan

^Kemudian untuk jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP di wilayah leses ini baru proses pembangunan rencana pembukaan akan dimulai tahun depan dan untuk sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/K) di wilayah Desa Leses belum ada, jadi untuk melanjutkan pendidikan tersebut harus keluar dari wilayah Desa Leses.

3. Sarana prasarana Kesehatan Desa Leses

Di Desa Leses terdapat 1 puskesmas pembantu (pustu) yang berlokasi di padukuhan nangsren yang berperan meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja puskesmas. Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM.

4. Sarana Ekonomi

Di wilayah Desa Leses terdapat sentra industri kecil tahu dan tempe yang berada di padukuhan banjarsari. Didalam padukuhan banjarsari ini hampir semua rumah tangga memproduksi tahu dan tempe, untuk pemasarannya masih dilakukan secara sendiri-sendiri dengan dipasarkan di pasar, pedagang sayur keliling, rumah makan, dan distributor lainnya.

Tabel 2.8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.350.000	85.100.000	9.250.000
4.2.	Dana desa	868.305.000	868.306.000	-
4.3.	Bagi hasil pajak dan retribusi	32.600.000	36.132.500	(1.532.500)
4.4.	Alokasi dana desa	334.047.763	334.231.763	(184.000)
4.5.	Bantuan keuangan provinsi?	15.000.000	5.000.000	30.000.000
4.6.	Bantuan keuangan kabupaten?	130.000.000	100.000.000	30.000.000
4.7.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000	1.812.814	187.186
	JUMLAH PENDAPATAN	1.495.303.763	1.430.583.077	65.720.685
5.	BELANJA			
5.1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan	497.920.915	475.450.914	22.470.001
5.2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	609.542.400	538.855.400	70.687.000
5.3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	72.500.000	72.438.500	61.500
5.4	Bidang pemberdayaan masyarakat	9.000.000	5.000.000	4.000.000
5.5	Bidang bencana, darurat, mendesak	427.156.000	398.053.480	29.102.520
	JUMLAH BELANJA	161.119.315	1.489.798.294	126.321.021
	SURPLUS / (DEFISIT)	119.815.552	59.215.217	60.600.335
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	119.815.552	119.815.552	-
	SILPA Tahun Berjalan		60.600.335	(60.600.335)

D

ari
tabel
diata
s
pene
liti
akan
men
gura
ikan
men
gena
i
bela

nja dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Belanja yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terbagi dalam beberapa sub bidang pembelanjaan didalamnya yaitu penyelenggaraan belanja desa slitap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, penyediaan sarana prasarana pemerintah desa, pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan yang terakhir yaitu sub bidang pertahanan.

Dari tabel APBDes diatas dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan terbesar yaitu pada dana desa sebesar 868.305.000 Sumber-sumber pendapatan Desa Leses terdiri dari 3 (tiga) sumber yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan retribusi, Alokasi dana desa, Bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten dan lain-lain pendapatan kalurahan yang sah. Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber penerimaan Desa yang menjadi kapasitas fiskal Desa. Sedangkan proporsi terbesar dari belanja yaitu belanja modal sebesar 609.542.400. Belanja Kalurahan menjadi indikator besaran APBDes pada suatu desa, sehingga menjadi cermin kemampuan keuangan suatu desa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan. Semakin besar alokasi belanja kalurahan pada struktur APBDes suatu desa, mencerminkan semakin besarnya kemampuan keuangan suatu kalurahan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.

Pembiayaan Desa disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, pinjaman Desa, hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, penerimaan piutang Desa, dan penerimaan kembali penyertaan modal. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Desa, dan pembayaran pokok hutang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya tentang Kinerja Kepala Dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Produktivitas Kepala Dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan

Produktivitas kinerja kepala dusun di Desa Leses sudah berjalan dengan baik. Hal dibuktikan dengan tidak adanya kendala-kendala yang berada di masyarakat. Dengan ada masyarakat yang terkena kasus narkoba, kepala dusun tentunya diperintahkan dari bapak polisi untuk menegur anak yang terkena kasus narkoba tersebut, dari kasus ini bapak kepala dusun menegur anak yang terkena

kasus narkoba itu dengan cara memberi peringatan untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian untuk contoh lainya mengenai produktivitas kepala dusun leses yaitu penarikan pajak bumi dan bangunan, Adanya kegiatan gotong royong untuk pembuatan jalan, Mengadakan bersih-bersih parit/irigasi di sekitar rumah warga, dan meminta masyarakat yang mempunyai anak untuk sekolah minimal SMP. Namun dalam bidang produktivitas kepala dusun di desa leses juga terdapat kelemahan yaitu desa leses memiliki wilayah yang sangat luas. kepala desa leses ini hanya berjumlah dua orang ,sehingga jika ada informasi-informasi untuk masyarakat selalu telat karena kepala dusun harus menghubungi RT/RW terlebih dahulu dan RT/RW sebagian besar di Desa Leses mereka masih belum bisa menggunakan HP yang menggunakan aplikasi WA, dengan adanya ini kepala dusun harus menghampiri satu persatu RT/RW tersebut untuk memberikan informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan masyarakat.

2. Kualitas pelayanan Kepala Dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan

Kualitas pelayanan Kepala Dusun Leses dalam mengawasi pembangunan sudah baik, hal ini ditunjukan ketika ada gotong royong masyarakat yang diadakan oleh rt atau rw, kepala dusun selalu terjun langsung kelapangan untuk memantau masyarakatnya gotong royong dengan adanya ini juga dapat menjaga kerukunan dengan baik. Dibuktikan dengan contoh pembangunan di padukuhan-padukuhan dibuat secara bergiliran karena satu kepala dusun mencangkup beberapa padukuhan jadi kalau ada dana dari pemerintah dalam pembangunan kepala dusun lebih mengutamakan yang paling penting dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh lainnya pada saat gotong royong kepala dusun selalu mengajak anak-anak muda yang ada di dusun untuk turut membantu dan kepala

dusun biasanya jika ada kegiatan gotong royong selalu memberikan rokok untuk penyemangat masyarakat.

3. Responsivitas Kepala Dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan

Kepala dusun dalam merespon masyarakatnya juga sudah bisa dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya masukan dari masyarakat untuk mengadakan ronda malam, dengan adanya ini kepala dusun kemudian mengadakan rapat dengan masyarakat untuk bersama-sama mengadakan ronda malam. Contoh lainnya pengadaan plakat yang bertuliskan pemulung, pemburu, dan sales dilarang masuk mengingat bahwa kita harus menjaga ekosistem dan mengingat bahwa sales yang berkeliling sangat mengganggu juga kadang meresahkan masyarakat. Dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara pada saat musyawarah dusun disitu masyarakat diminta untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Kemudian contoh lainnya adanya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan sablon dari Desa untuk anak-anak muda di Desa Leses.

4. Tanggungjawab Kepala Dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan

Tanggungjawab kinerja kepala dusun yang berada di wilayah Desa Leses sudah baik. Seperti halnya tanggung jawab kepala dusun dalam proses pembangunan jalan sudah hampir semua padusunan sudah diperbaiki, dan dalam menjaga lingkungan kepala dusun sudah meminta masyarakatnya selalu mengadakan kerja bakti bersih-bersih lingkungan, dan disini masyarakat selalu mendukung kinerja kepala dusun. Contoh dalam bersih-bersih lingkungan seperti pembersihan parit, rumput pinggir-pinggir jalan dusun, dan sungai di pinggir dusun.

5. Akuntabilitas Kepala Dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan

Untuk pertanggungjawaban kepala dusun dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan juga sudah baik. Untuk Tanggung jawabnya kepala dusun dalam ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat juga sudah baik. Contoh dalam hal ini dengan adanya masyarakat yang terlibat kasus narkoba disini kepala dusun bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pertanggungjawaban melaksanakan pembinaan kemasyarakatan guna meningkatkan kemampuan, dan kesadaran menjaga lingkungan sudah baik kepala dusun jika dilihat tidak mengalami kesulitan. Contoh dalam hal ini dengan adanya masyarakat dapat diajak bersama-sama menjaga lingkungan sekitar.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu untuk kepala dusun dalam produktivitasnya sebaiknya kepala dusun dapat mengoptimalkan pekerjaannya karena jika ada informasi-informasi terbaru dari Desa selalu terlambat dan kadang ada dusun yang sama sekali tidak mengetahui informasi tersebut. Untuk kualitas layanan kepala dusun diharapkan dapat memberikan pelayanannya secara maksimal tidak hanya yang dipentingkan hanya salah satu padukuhan karena kepala dusun tidak hanya mewilayahi satu padukuhan tetapi mewilayahi beberapa padukuhan. Dalam responsivitas kepala dusun juga diharapkan dapat merespon ataupun menanggapi usulan-usulan dari masyarakatnya dengan adanya ini diharapkan kepala dusun menjadi lebih mengerti apa yang diharapkan oleh masyarakatnya. Kemudian untuk responibilitas kepala dusun sebagai penanggungjawab masyarakat yang diwilayahinya,

maka dari itu kepala dusun dapat memberikan kegiatan-kegiatan positif seperti pelatihan-pelatihan, posyandu untuk remaja, dll bagi masyarakat yang terutama anak-anak muda yang dimana dilihat dari anak-anak leses ini banyak yang mengikuti sebuah genk yang pergaulannya lebih bersifat ke hal negatif. Dan terakhir untuk akuntabilitas kepala dusun dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan masyarakat banyak sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati karena jika terjadi sesuatu hal di sebuah padukuhan maka yang dimintai pertanggungjawaban pasti kepala dusunnya.

Daftar Pustaka

- Agustina, Ratna. 2013 Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. *Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.
- Astariyani Gede. 2016 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pemerintah Kota Denpasar Dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Faradila A, Marayasa N. 2019. Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Dinar Indonesia. *Jurnal Ekonomi Efektif Vol 2, No.1, Oktober 2019*.
- Haryanti. Berta. 2015. Fungsi Dan Peran Kepala Kampung Dalam Menjalankan Tugas Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Mapan Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrasi Negara volume 3 nomor 4 tahun 2015*.

- Hanum .F, dan Adhilani. P. 2019. Konflik Pemilihan Kepala Dusun Depok Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kajian Sosiologi Vol 8 No 2 September 2019*.
- Hariani Dwi, Hidayat Fauzan. 2019 Tinjauan Yuridis Terhadap Tukar Menukar Tanah Hak Milik Dengan Tanah Kas Desa di Desa Jambukulon. *Jurnal. Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Boyolali*.
- Huda, Nimatul. 2007. Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik Menurut Perda No. 2 Tahun 2007 Kabupaten Sleman Yogyakarta Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta*.
- Indra, Indrayati, Ibrahim Akmal, dan Rapami A.Albert. 2022. Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pengelolaan Kepala Kampung (studi kasus kampung kampung di distrik Kota Kabupaten Merauke). *Jurnal Sosial dan Politik Volume : 12 Nomor 2 Desember 2022*.
- Mardianto, Wedayanti Devi, dan Nazi Yendri.P. 2019. Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5, No.2 Tahun 2019*.
- Palyama.E. 2021. Evaluasi Kinerja Kepala Kampung Wilion Dalam Pemerintah Dengan Di Wilayah Distrik Wemak Kabupaten Sorong. *Jurnal ELITIS Social Scienc Vol.1, No. 1, Agustus 2021*.
- Setiad Budi, Syam Nurul, dan Krtiman Maman. 2022. Peran Kepala Dusun sebagai Unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu Kepala Desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume 02 nomor 02 september 2022*.
- Sinambela P.L. 2012. *Kinerja Pegawai : Teori Pengukuran Dan Implikas*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sudiran F.I., dan Bulan N, 2018. Kepemimpinan Kepala Kampung dan efektivitas dana Kampung di kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Administrasi Publik Vol 2. No 2 2018*.

Susana, V. 2020. Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Gile Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi*. Fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan universitas islam negeri AR-Raniry. Banda Aceh.

Tulusan .F, dan Rompas W. 2015. Kinerja Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pembangunan Desa Di Kampung Nduma Distrik Mapnduma Kabupaten Nduga. *Jurnal Administrasi Publik Vol 2. No 029 2015*.

Watkot, Tamher Samsul, dan Budiaman Arif. 2022. Kinerja Kepala Kampung Dalam Pelayanan Publik Di Kampung Trikora Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022)*.

SUMBER INTERNET

Moehariono.2012.Kinerja.[http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/75/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Moehariono%20\(2012%3A95\),suatu%20perencanaan%20strategis%20suatu%20organisasi](http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/75/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Moehariono%20(2012%3A95),suatu%20perencanaan%20strategis%20suatu%20organisasi.). 26 Januari 2023 (21.09).

Prawirosento.<https://id.hrnote.asia/orgdevelopment/220527-kinerja-karyawan-pengertian-masalah-dan-faktor-yang-mempengaruhi/>. 26 Januari 2023 (22.35).

Muhammad Kamal. 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10995/>. 27 Januari 2023 (20.45).

Sumber Internet

<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-kinerja-pegawai-15>

DOKUMENTASI WAWANCARA

No	Dokumentasi	Keterangan
1		Foto wawancara bersama Bapak H. Puryanto, selaku Kepala Desa Leses.

2		Foto wawancara bersama Bapak Fokus Wahyudi, selaku sekretaris Desa Leses.
3		Foto wawancara bersama Bapak Krismanto, selaku Kepala Dusun 1
4		Foto wawancara bersama Bapak Heru Widodo, selaku Kepala Dusun 2.

5		Foto wawancara bersama Bapak Bohyamin, selaku Ketua LPMD.
6		Foto wawancara bersama Diki Dian P, selaku Ketua Karang Taruna Desa Leses.
7		Foto wawancara bersama Bapak Sumanto, selaku Masyarakat Desa Leses.

8		Foto wawancara Bersama Dika, selaku Masyarakat Dk. Gamblokan
9		Foto wawancara Bersama Muhammad Rafly Reyhan Fadhillah, selaku Masyarakat Dk. Dadirejo
10		Foto wawancara Bersama Sumartini, selaku Kader PKK

11		Foto wawancara Bersama Brahim.SAg.,M.pd, selaku Ketua BPD
12		Foto wawancara bersama Maryanto, selaku Ketua RT 01

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses

Isentitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Pertanyaan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Masyarakat Desa, dan Ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

A. Produktivitas Kepala Dusun

1. Hasil Apa yang dilakukan oleh Kepala dusun dalam Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Hasil Apa yang dilakukan oleh Kepala dusun dalam Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Hasil Apa yang dilakukan oleh Kepala dusun dalam Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Apa yang dilakukan oleh Kepala dusun dalam Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

B. Kualitas Pelayanan

1. Bagaimana kualitas layanan kepala dusun dalam / di bidang Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2. Bagaimana kualitas layanan kepala dusun dalam / di bidang Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Bagaimana kualitas layanan kepala dusun dalam / di bidang Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Bagaimana kualitas layanan kepala dusun dalam / di bidang Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. Responsivitas

1. Bagaimana tanggapan Kepala Dusun dalam bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Bagaimana kepala dusun menanggapi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Apa hasil tanggapan dari masyarakat yang dilakukan kepala dusun dalam Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Bagaimana kepala dusun dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

D. Responbilitas

1. Bagaimana tanggung jawab kepala dusun dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Apa hasil tanggung jawab kepala dusun dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Bagaimana tanggung jawab kepala dusun dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan guna meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya.
4. Bagaimana tanggung jawab kepala dusun dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

E. Akuntabilitas

1. Apa bentuk/ccontoh tanggung jawab kepala dusun dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Bagaimana pertanggungjawaban kepala dusun dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Apakah dalam pertanggungjawaban melaksanakan pembinaan kemasyarakatan guna meningkatkan kemampuan, dan kesadaran masyarakat menjaga lingkungannya mengalami kesulitan.
4. Apa bentuk/ccontoh pertanggungjawaban kepala dusun dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA LESES**

Alamat : Dadirejo, Leses, Manisrenggo Klaten, Jawa Tengah kode pos 57485

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anggit Dwi Febri Handoko

Nim : 19520034
Fakultas : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Program : S-1 Ilmu Pemerintahan
studi

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan data dengan wawancara maupun pengambilan dokumen sebagai syarat penyusunan skripsi guna memperoleh gelar (S1) Yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan selesai.

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah:

“Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Desa Leses, 10 Juli 2023
Kepala Desa Leses

H. Puryanto